



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1993**

Nomor 3

Seri D Nomor 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR ; 3 TAHUN 1991**

TENTANG

**PEMBANGUNAN DESA TERPADU GEURAKAN MAKMU BEUSARE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNURKEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

- Menimbang** ; a. bahwa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 3 tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta untuk mempercepat lajunya tingkat perkembangan desa dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, perlu memadukan semua program/proyek masuk desa dalam suatu kegiatan Pembangunan Desa Terpadu Geurakan Makmu Beusare.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** ; 1. Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

- b. **BAB II PEMBANGUNAN DESA TERPADU ;**
 - A. KERANGKA DASAR PEMBANGUNAN
 - B. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN
 - C. PEMBANGUNAN PEDESAAN
 - D. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

- c. **BAB III ADMINISTRASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN**
 - A. TUJUAN
 - B. SASARAN POKOK.
 - C. MEKANISME
 - D. PELAKSANAAN
 - E. PENGENDALIAN
 - F. KOORDINASI

- d. **BAB IV PENUTUP**

Pasal 2

Isi beserta uraian/rincian hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat(2) Peraturan Daerah ini, terdapat dalam pola umum Pembangunan Desa Terpadu Geuma Beusare yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pola operasional tahunan pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Geuma Beusare dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh akan ditetapkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan- ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturtan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 20 JUNI 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWQA ACEH

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
ACEH

IBRAHIM HASAN

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 1 tanggal 27 Januari 1993
Seri "D" Nomor 3.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
140.21-066 tanggal, 28-1-1993

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Asnawi Hasjmy,SH
Pembina Utama
NIP. 390003081

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1993
TENTANG
PEMBANGUNAN DESA TERPADU GEURAKAN
MAKMU BEUSARE

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN	15
A. LATAR BELAKANG	15
B. PENGERTIAN	19
C. MAKSUD DAN TUJUAN	21
D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	21
E. LANDASAN	21
BAB II PEMBANGUNAN DESA TERPADU	22
A. KERANGKA DASAR PEMBANGUNAN	22
B. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN	26
C. PEMBANGUNAN PEDESAAN	26
D. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN	29
BAB III ADMINISTRASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN	32
A. TUJUAN	32
B. SASARAN POKOK	32
C. MEKANISME	32
D. PELAKSANAAN	34
E. PENGENDALIAN	34
F. KOORDINASI	34
BAB IV PENUTUP	34

LAMPIRAN

BAB - I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Pembangunan Nasional dan Daerah dalam repelita V merupakan kelanjutan serta peningkatan pelaksanaan pembangunan Repelita-repelita sebelumnya dan dilaksanakan atas dasar pemikiran-pemikiran pokok sebagai mana dikemukakan dalam undang-undang dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN).

Pembangunan Daerah merupakan upaya pencapaian sasaran Nasional di daerah sesuai dengan masalah, potensi, aspirasi dan prioritas masyarakat di Daerah. Sasaran Nasional dan sasaran daerah harus diusahakan dengan sebaik-baiknya, yang memerlukan Kooordinasi dan sinkronisasi dalam gerak pembangunan Nasional dan Daerah.

Dalam GBHN 1988 antara lain dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah perlu terus didorong dan ditingkatkan prakrsa dan peranserta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat serta peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan. Untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan dari seluruh aparaturnya Pemerintah di daerah sekaligus dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu perlu terus ditingkatkan kemampuan Daerah untuk membangun antara lain dengan menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.
- b. Dalam melaksanakan pembangunan masing-masing Daerah perlu lebih meningkatkan kesadaran dan kemampuan penduduknya untuk memanfaatkan serta memelihara kelestarian kemampuan berbagai sumber alam, membina lingkungan dan mengatasi berbagai masalah yang mendesak. Untuk itu perlu ditingkatkan usaha penyuluhan dan meningkatkan keterampilan masyarakat.
- c. Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk pen-

ciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk memproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu menggerakkan dan memanfaatkan sebaik-sebaiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya.

Pada saat ini Pembangunan Daerah Propinsi daerah Istimewa Aceh telah memasuki tahap akhir dari Pembangunan daerah jangka Panjang 25 tahun pertama. Tahap pembangunan waktu ini merupakan momentum strategis, karena harus dapat memantapkan landasan yang kokoh kuat guna memasuki pembangunan Daerah jangka Panjang tahap kedua.

Walaupun telah banyak hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pelita I, II, III, dan IV namun disadari bahwa masih terdapat masalah masalah pokok yang belum dapat sepenuhnya dapat terselesaikan, yang perlu dilanjutkan pada Pelita Kelima dan Pelita-Pelita selanjutnya.

Masalah-masalah pokok tersebut adalah :

- a. Kesenjangan struktural,spatial, sosial ekonomi dan kultural diantara Zona pertanian, yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara. dengan (2) Zona Industri, yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Aceh Besar, Kotamadya Banda Aceh dan Sabang.
- b. Kelembagaan pedesaan yang tidak berkembang dalam proses pembangunan khususnya lembaga tradisional Meunasah dan mukim sehingga peran sertamasyarakat secara luas belum berkembang sebagaimana yang diharapkan.
- c. Keistimewaan dan Identitas Daerah Istimewa Aceh dibidang Agama, Pendidikan dan dibidang Adat Istiadat belum berkembang sebagai landasan dan kerangka dasar pembangunan selanjutnya.

Untuk mengatasi masalah-masalah pokok tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah menetapkan kebijaksanaan pembangunan berdasarkan telepon pembangunan 145810 yaitu merupakan pedoman dalam upaya pelaksanaan pembangunan :

- a. Pembangunan diPropinsi Daerah Istimewa Aceh bersifat integral dan

menyatu dengan pembangunan nasional. Dasar pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah SATU POLA PIKIR yang berpedoman kepada landasan Idiil Panca Sila dan UUD Dasar 1945(nasional) dan Pancacita (Daerah) sedangkan landasan Operasional adalah GBHN. REPELITA Nasional dan Program Kabinet Pembangunan V yang kesemuanya tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang mengandung aspirasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

- b. Keluruhan ruang lingkup pembangunan di Daerah Istimewa Aceh bertumpu pada EMPAT TRILOGI, yaitu :
1. Trilogi Pembangunan Nasional (Pemerataan, Pertumbuhan, dan Stabilitas),
 2. Trilogi Program Pemerintah Daerah(Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Masyarakat).
 3. Trilogi Keistimewaan Aceh (Pendidikan, Agama, dan adat Istiadat).
 4. Trilogi Etos Kerja (Logika, Etika dan Estetika).
- c. Keempat Trilogi tersebut dirangkum dalam dua bidang pembangunan utama, yaitu pembangunan Ekonomi dan pembangunan sosial budaya, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada LIMA SASARAN DAN PRIORITAS, yaitu :
1. Prasarana ;
 2. Produksi ;
 3. Pemasaran ;
 4. Penduduk dan pemukiman;
 5. Peningkatan pendapatandan Pemupukan Modal;
- d. Melalui empat Bidang dan lima sasaran Prioritas, Pembangunan Daerah Istimewa Aceh diarahkan untuk mensukseskan DELAPAN JALUR PEMERATAAN DAN DELAPAN JALUR SUKSES.

Delapan Jalur Pemerataan adalah :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan :
2. Pemerataan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan :

3. Pemerataan pembagian pendapatan:
4. Pemerataan kesempatan kerja:
5. Pemerataan kesempatan berusaha:
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi Generasi Muda dan kaum wanita:
7. Pemertaan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Delapan sukses adalah :

1. Sukses pangan:
2. Program Inpres;
3. Koperasi;
4. Transmigrasi dan keluarga berencana;
5. Pemasyarakan P-4;
6. Pelaksanaan Kepres Nomor 29 Tahun 1984;
7. Pertanian;
8. Exspor Non Migas.

Perlu disadari bahwa dalam upaya mengejar ketinggalan Daerah Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak mungkin diraih dengan upaya yang bersifat konvensional atau bersifat rutin saja.

Berkenan dengan hal tersebut, maka disamping mempertajam prioritas pembangunan juga diupayakan menuntaskan suatu strategi perjuangan dalam bentuk berbagai terobosan meliputi 10 terobosan yaitu :

1. Pengembangan Zona Industri dan Zona Peranian;
2. Meunasah sebagai pusat kegiatan pembangunan;
3. Pengembangan Profesionalisme dan peningkatan kualitas manusia;
4. Peningkatan pendapatan Daerah (PAD, PBB dan lain-lain.
5. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
6. Efisiensi dan disiplin aparatur ;
7. Deregulasi dan debiroktisasi;

8. Peningkatan peranan wanita;
9. Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan;
10. Pembinaan Identitas dan keistimewaan Aceh (Agama, Pendidikan dan Adat Istiadat).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan PELITA V dan Pelita-Pelita selanjutnya, pemerintah Daerah dan masyarakat Aceh menerapkan pendekatan dan strategi pembangunan wilayah pedesaan dengan nama Pembangunan Terpadu GEURAKAN MAKMU BEUSARE disingkat GEUMA BEUSARE.

B. PENGERTIAN

Pendekatan dan strategi pembangunan Daerah yang ditempuh melalui Pembangunan Desa Terpadu GEURAKAN MAKMU BEUSARE yang dapat juga disebut GEURAKAN MAKMU BEUSARE ADE MEURATA bermakna bergerak bersama Mencapai kemakmuran secara merata pada hakikatnya bertumpu pada peran serta masyarakat desa secara luas.

Pembangunan desa yang dilaksanakan sebagai suatu gerakan bermakna sebagai usaha dan langkah-langkah yang dinamis untuk menggalakkan peranserta masyarakat bersama pemerintah dalam pembangunan pedesaan sesuai dengan kebijaksanaan arah dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan .

Pembangunan Desa dimaksudkan sebagai usaha dan langkah-langkah untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang semakin merata dan adil.

Pembangunan Desa Terpadu (PDT) sebagai suatu keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunanyang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah khususnya keterpaduan program-program pembangunan sektoral dalam suatu kerangka pembangunan Wilayah pedesaan terpadu yang bersifat multi dan lintas sektoral.

Pengertian desa dimaksudkan sebagai unit pemerintahan terendah ter-

masuk didalamnya pengertian kelurahan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

Disamping hal-hal tersebut diatas GEUMA BEUSARE sebagai pendekatan dan strategi Pembangunan Desa Terpadu(PDT) dapat dijabarkan berdasarkan aspek-aspeknya yaitu ;

a. **Pembangunan desa terpadu sebagai suatu Pendekatan.**

Pembangunan desa terpadu didasarkan pada pertimbangan dan kesadaran bahwa masyarakat pedesaan merupakan suatu kesatuan yaitu suatu unit yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan bagian penting dari unit kesatuan ini dan karenanya diperlukan suatu pendekatan terpadu.

b. **Pembangunan desa terpadu sebagai suatu tujuan.**

Pembangunan desa terpadu sebagai suatu tujuan dapat diartikan sebagai kebutuhan akan keterpaduan dari berbagai kegiatan untuk mencapai atau mewujudkan pembangunan komprehensif dalam rangka menjamin peran-serta masyarakat pedesaan dan menjamin masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.

c. **Pembangunan desa terpadu sebagai suatu strategi.**

Pembangunan desa terpadu sebagai suatu strategi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang spesifik, seperti peningkatan produksi peningkatan fasilitas pelayanan dan usaha pemenuhan dasar manusia dan desa.

d. **Pembangunan desa terpadu sebagai suatu metode.**

Pembangunan desa terpadu sebagai suatu metode dikaitkan dengan masalah-masalah operasional, yaitu meliputi masalah perencanaan, penyusunan program dan proyek serta pelaksanaan berbagai kegiatan yang saling menunjang.

Masing-masing aspek ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan GEUMA BEUSARE seperti Dinas/Instansi sektoral, Kepala Daerah Tingkat I, dan tingkat II Camat, Kepala Desa/ Kelurahan, pihak swasta dan masyarakat pedesaan secara luas.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan GEUMA BEUSARE adalah untuk menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah Tingkat I dan II dan Dinas/Instansi sektoral secara terpadu didalam menggerakkan peranserta masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam rangka menyongsong Tinggal Landas Pembangunan Nasional Pelita VI.

D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.

Pelaksanaan GEUMA BEUSARE diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu sepuluh tahun, meliputi PELITA V dan VI Daerah dan Nasional.

Pelaksanaan GEUMA BEUSARE dimulai tahun anggaran 1989/1990.

E. LANDASAN.

GEUMA BEUSARE dilaksanakan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh berlandaskan :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. TAP MPR-RI No.II/MPR/1988 tentang GBHN,
 - b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.13 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.2 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat dan Istiadat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - d. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.050.1/235 tanggal 31 Maret 1989 tentang Repelita V Propinsi Daerah Istimewa

Aceh.

4. Landasan struktural ;

- a. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh.
- b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

BAB II. PEMBANGUNAN DESA TERPADU.

Berdasarkan karakteristik, identitas, tingkat pembangunan dan masalah-masalah pokok yang dihadapi, maka pemerintah dan masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah menetapkan pendekatan strategis Pembangunan desa terpadu GEUMA BEUSARE dengan thema PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN TERPADU.

GEUMA BEUSARE sebagai pendekatan dan strategi Pembangunan Wilayah Pedesaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- A. Kerangka Dasar pembangunan,
- B. Perwilayahan Pembangunan
- C. Pembangunan desa.
- D. Pengembangan Kelembagaan

A. Kerangka dasar pembangunan,

Perangkat dasar pendekatan dan strategi Pembangunan Desa Terpadu dapat dibedakan berdasarkan tiga tingkat, yaitu :

a. Tingkat Wilayah Makro

Pada tingkat wilayah Makro atau Propinsi, Pembangunan Desa Terpadu merupakan pembangunan Wilayah Pedesaan terpadu (PWPT) yaitu mempertimbangkan struktur dan organisasi tata ruang wilayah seperti :

1. Hirarki dan pola pemukiman penduduk yaitu lokasi dan fungsi kota serta wilayah pengaruhnya, yang merupakan wilayah Pembangunan.
2. Struktur dan kegiatan fungsional sosial ekonomi internal tiap satuan wilayah pembangunan.
3. Hubungan antar satuan wilayah pembangunan; yaitu perdagangan dan arus penduduk beserta kegiatannya.

Wilayah makro adalah satuan wilayah Pembangunan pada tingkat Propinsi dan dibedakan atas Zona Pertanian dan Zona Industri.

b. **Tingkat wilayah Meso.**

Pada tingkat wilayah Meso atau pada tingkat satuan wilayah Pembangunan, selain aspek wilayah dan spesifikasi wilayah, maka masalah sosial ekonomi harus lebih dulu mendapatkan perhatian dan diidentifikasi dengan tepat karena tiap wilayah terutama berbeda dalam hal-hal terakhir ini.

Wilayah meso adalah satuan wilayah pembangunan yang terdapat pada tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

c. **Tingkat wilayah Mikro.**

Pada tingkat wilayah Mikro, yaitu pada unit-unit wilayah yang lebih kecil dan lebih homogen masalah pokok lebih spesifik sehingga pengembangannya juga lebih spesifik.

Wilayah Mikro adalah wilayah Meunasah dan Mukim yang terdapat pada tiap-tiap Kecamatan.

Komponen dan unsur-unsur strategis dalam PWPT, secara sederhana diidentifikasi sebagai berikut ;

1. Pembangunan Pertanian yaitu yang dapat dicapai melalui peningkatan produksi dan produktifitas pertanian
2. Pengembangan Pusat Pelayanan Pembangunan (PUSPELBANG) yaitu pengembangan fungsi kota-kota sebagai PUSPELBANG dalam suatu sistim hirarki yang secara fungsional terpadu dan menunjang pengembangan wilayah pedesaan.

1. **Pembangunan Pertanian.**

Pembangunan Pertanian; terutama pertumbuhan sektor pertanian dapat dicapai melalui usaha dan langkah-langkah ;

- a. Pengembangan dan transformasi unit-unit usaha tani dari usaha tani subsistem menjadi komersial melalui tahap-tahap intensifikasi, diversifikasi menuju tahap spesialisasi.
- b. Pengorganisasian Produksi dengan basis unit-unit usaha tani keluarga.
- c. Pengembangan sistem penunjang usaha tani dan pertanian harus diselenggarakan secara simultan.
- d. Penggalakan peranserta masyarakat yang terorganisasikan oleh dan untuk masyarakat.
- e. Pengembangan Industri Pedesaan baik Industri rumah tangga/kerajinan maupun Industri Alat-alat pertanian dan pengolahan hasil pertanian.

Pengembangan usaha dan kegiatan ini sangat tergantung pada :

- a. Teknologi, khususnya dalam hal penerapan teknologi tepat guna dan difusi inovasi ke wilayah pedesaan.
- b. Sumber daya manusia, khususnya dalam hal peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pedesaan melalui penyuluhan dan latihan.
- c. Sistem Insentif, yaitu insentif yang dapat mendorong masyarakat pedesaan meningkatkan produksi, pendapatan dan peransertanya dalam pembangunan.
- d. Kelembagaan dan organisasi, yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam wadah kelembagaan dan organisasi dalam gerakan pembangunan.

Untuk peningkatan Pertumbuhan pertanian dikenal beberapa pendekatan yang patut mendapat perhatian yaitu :

- a. Pendekatan komoditi, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi tertentu, khususnya berdasarkan pendekatan sistem agrobisnis, yaitu pendekatan integrasi sistem produksi pertanian secara vertikal dan sub sistem pra produksi. Khusus mengenai sub sistem pasca produksi masalah agro industri atau

pengolahan hasil pertanian lokasinya harus diperhatikan terutama dari aspek ekonomi wilayah dan tata ruang.

- b. Pendekatan pendapatan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan petani, baik pendapatan dari usaha tani maupun pendekatan luar usaha tani.
- c. Pendekatan organisasi produksi, yaitu pendekatan yang organisasian produksi dan usaha tani tertentu, apakah dalam bentuk usaha tani kecil yang terhimpun dalam KUD dalam bentuk organisasi PIR dan dalam bentuk perkebunan atau perusahaan besar BUMN dan swasta. Hal ini sangat penting dilihat dari perspektif produksi dan ekonomi wilayah dimasa mendatang dalam menghadapi tekanan pasar.
- d. Pendekatan tata ruang, yaitu yang berkenaan dengan struktur dan organisasi tata ruang wilayah yang meliputi (1) Pusat-pusat kegiatan dan pelayanan dalam suatu sistim hirarki. (2) Jalur-jalur pembangunan yang menghubungkan antar pusat dan antar wilayah. (3) Wilayah-wilayah pengembangan dan jangkauan pelayanan.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penting dalam pembangunan desa terpadu dilihat dari dua aspek :

- a. Manfaat penetrasi atau investasi modal dan difusi teknologi yang dilakukan dan berlangsung ke wilayah pedesaan yaitu agar diperoleh manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat dan pemerintah.
- b. Manfaat memperoleh nilai tambah dari berbagai kegiatan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.

2. Pengembangan PUSPELBANG,

Pengembangan kota-kota sebagai PUSPELBANG secara fungsional dalam suatu sistim hirarki, terutama ditekankan pada peningkatan fungsi dan peranan kota-kota kecil dalam rangka peningkatan fasilitas pelayanan di wilayah pedesaan seperti kota-kota Kecamatan.

Peranan PUSPELBANG dalam pembangunan wilayah terpadu merupakan unsur strategis dalam rangka pembangunan pedesaan.

B. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN.

Dalam rangka mewujudkan GEUMA BEUSARE dilakukan pendekatan dari prioritas pengembangan wilayah dalam suatu sistim perwilayahan pembangunan.

Perwilayahan dan pusat pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dapat dilihat pada peta perwilayahan dan Pusat pembangunan.

Wilayah-wilayah pembangunan tersebut dikelompokkan kedalam zona Pertanian dan zona Industri, seperti terlihat pada peta zona pertanian dan zona Industri.

Dalam rangka pembangunan wilayah Pedesaan terpadu melalui Geuma Beusare beberapa hal penting dan strategis harus diperhatikan yaitu ;

- a. Hubungan fungsional antara pusat pertumbuhan dan pelayanan dengan daerah-daerah pengaruhnya atau wilayah belakangnya.
- b. Hubungan fungsional antara wilayah-wilayah pembangunan.
- c. Fungsi tiap Pusat pertumbuhan dan pelayanan dan hubungan diantara pusat-pusat tersebut suatu sistim jenjang hirarki.

Semua fungsi dan hubungan ini harus dipahami dan diperhatikan pada tingkat wilayah makro, meso dan mikro dalam PWPT.

C. PEMBANGUNAN DESA.

Pembangunan desa di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dilaksanakan sebagaimana halnya dengan pembangunan 66.594 desa di seluruh Indonesia.

Perkembangan sosial ekonomi pedesaan Indonesia dapat diketahui berdasarkan tingkat perkembangan desa, sebagai berikut :

- a. *Desa Swadaya*,
Desa yang ditinjau dari segi ideologi politik, tingkat pendapatan tingkat ketergantungan peranserta masyarakat, kesehatan masyarakat pendidikan, serta ketentraman dan ketertiban belum memadai (skor-50).

b. *Desa Swakarsa*

Desa yang ditinjau dari segi idiologi politik, tingkat pendapatan, tingkat ketergantungan, peranserta masyarakat, kesehatan masyarakat, pendidikan serta ketentraman dan ketertiban mulai mantap(skor 51-100).

c. *Desa swasembada*

Desa yang ditinjau dari segi ideologi politik, tingkat pendapatan, tingkat ketergantungan, peranserta masyarakat, kesehatan masyarakat, pendidikan, serta ketenteraman dan ketertiban sudah mantap(skor 101-150)

Tingkat perkembangan desa di Propinsi Daerah istimewa Aceh berdasarkan evaluasi tahun 1988/1989 adalah sebagai berikut ;

1. Desa swadaya	93 desa	(1,70 %)
2. Desa swakarsa	3.819 desa	(69,91 %)
3. Desa swasembada	1.551 desa	(28,39 %)
	<hr/>	
	5,463 desa	(100 %)

Perkembangan desa swadaya menjadi desa swakarya 4,98 % pertahun dan perkembangan desa swakarsa menjadi desa swasembada 6,79% pertahun. Apabila dibandingkan dengan Pelita III Perkembangan desa swasembada pada Pelita IV cenderung semakin meningkat dari 1,14 % menjadi 6,79 % pertahun. tetapi bila dibandingkan target Nasional dalam Pelita IV (7 % pertahun), laju perkembangan desa di Propinsi Daerah Istimewa Aceh belum mencapai sasaran yang ditetapkan.

Repelita V Nasional mentargetkan pendapatan jumlah seluruh desa swasembada sebesar 60 % dalam rangka persiapan tinggal landas, sedangkan tingkat pencapaian desa swasembada di Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada akhir tahun 1988/1989 baru berjumlah 1.551 desa (28,39 %). Keadaan tersebut merupakan tantangan berat yang perlu segera diatasi. Kendala terhadap percepatan pencapaian desa swasembada antara lain ;

- a. Sebagian letak desa terpencil dan terisolir dari Pusat-pusat pembangunan.
- b. Komposisi tenaga kerja yang tidak seimbang dalam arti sebagian desa penduduk padat dengan jumlah tenaga kerja yang melebihi daya tampung potensi desa berpenduduk jarang dengan tenaga kerja yang kurang.

- c. Pemerintah desa dan lembaga-lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- d. Lembaga yang dapat menggalang dan menggerakkan peraserta masyarakat seperti LKMD, PKK, KUD dan lain-lain belum berperan sebagaimana diharapkan.
- e. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan kesadaran warga desa rendah, menyebabkan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakat rendah.

Dalam pelaksanaan program pembangunan desa di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, tidak dapat terlepas dari kebijaksanaan dan program pembangunan desa Nasional, khususnya dalam pelaksanaan :

- a. Kebijakan pembangunan Daerah Tingkat I:
 - 1. Program Pembangunan Daerah Tingkat I.
 - 2. Program peningkatan jalan dan Penggantian Jembatan,
- b. Kebijakan pembangunan Daerah Tingkat II:
 - 1. Program Pembangunan Daerah tingkat II.
 - 2. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Kabupaten/Kotamadya.
 - 3. Program Pendidikan Dasar.
 - 4. Program pelayanan Kesehatan.
 - 5. Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan air.
 - 6. Program perumahan Rakyat, Penyediaan Air Bersih dan penyehatan Lingkungan.
- c. Kebijakan pembangunan Desa:
 - 1. Program Bantuan Pembangunan Desa.
 - 2. Program pembinaan unit Daerah kerja pembangunan (UDKP)
 - 3. Program Peningkatan Swakarsa dan swadaya Masyarakat.
 - 4. Program kegiatan Pengembangan Kawasan terpadu.
- c. Kebijakan Penataan ruang Daerah:
 - 1. Program pemantapan strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang

2. Program Penyusunan Rencana struktur tata Ruang Daerah Tkt.I
 3. Program Penyusunan Rencana Umum tata Ruang Daerah Tingkat II.
 4. Program Penyusunan rencana Umum Tata Ruang Kawasan.
 5. Program Pendidikan dan latihan.
 6. Program Penataan Batas Administrai Daerah.
- e. Kebijakan penataan Agraria.
1. Program tata guna Tanah.
 2. Program Pengurusan Hak dan Sertifikat tanah.
 3. Landreform.

Program-program tersebut diatas dan semua Program Sektoral lainnya akan berlangsung di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dalam rangka pelaksanaan GEUMA BEUSARE dua hal pokok perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Pelaksanaan semua program pembangunan tersebut harus berdasarkan peroritas wilayah, yaitu satuan wilayah pembangunan.
- b. Manajemen semua program pembangunan tersebut harus terkoordinasikan dalam sistim Manajemen GEUMA BEUSARE.

D. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN.

Prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan GEUMA BEUSARE adalah sebagai berikut :

- a. Peranserta masyarakat adalah merupakan unsur utama dalam pengertian bahwa KEKUATAN SOSIAL masyarakat diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan.
- b. Lembaga sosial masyarakat, khususnya lembaga adat dan istiadat, dikembangkan sebagai landasan dan kerangka dasar pembangunan.
- c. Satuan-satuan wilayah pembangunan dan Pusat-pusatnya, pada tingkat Wilayah Mikro, Meso dan Makro harus dapat mencerminkan butir 1 dan 2 dalam pelaksanaan pembangunan.

Unit lembaga Adat dan Istiadat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, ada-

lah :

- a. **MEUNASAH** adalah pusat kegiatan masyarakat dan lambang persatuan dan kesatuan masyarakat Gampong.
- b. **MUKIM** adalah gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas batas wilayah tertentu baik yang berwujud Gampong maupun Wilayah yang belum atau tidak merupakan Gampong-gampong. Setiap **MUKIM** mempunyai sebuah **MESJID JAMIK** sebagai pusat kegiatan masyarakat dan lambang persatuan dan kesatuan masyarakat,

Sesuai dengan perkembangan waktu peran dan fungsi kedua lembaga ini semakin surut walaupun masih hidup dalam masyarakat.

Dewasa ini peran dan fungsi kedua lembaga ini berfariasi ditiap daerah dan kemundurannya antara lain disebabkan oleh :

1. Dengan berlakunya undang-undang Nomor 5 tahun 1979, maka Gampong berubah menjadi desa/kelurahan dan pengembangan Lembaga-lembaga LKMD, LMD dan organisasi formal lainnya menyebabkan mundurnya peran dan fungsi lembaga tradisional **MEUNASAH**. Sebaliknya lembaga-lembaga baru belum atau kurang berfungsi.
2. Dengan terbentuknya desa dan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1979, maka peran dan fungsi **MUKIM** menjadi hilang. Dilain pihak, terutama di Kecamatan-kecamatan yang luas dan mempunyai banyak desa, Camat tetap mempungsikan **MUKIM** sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dan masyarakat masih menghormati lembaga ini.
3. Dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan prasarana dan sarana pembangunan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat maka di beberapa Gampong dalam satu **KEMUKIMAN** terdapat **MESJID JAMIK** sehingga orientasi Gampong-gampong ke Gampong yang merupakan Pusat Mukim menjadi berkurang.

Pendekatan **GEUMA BEUSARE** adalah melalui pembangunan peran dan fungsi **MEUNASAH** dan **MUKIM**. Dengan demikian peran dan fungsi kedua lembaga ini harus dilihat dalam ruang lingkup yang lebih luas meliputi aspek tata ruang dan sosial ekonomi.

Unsur-unsur MEUNASAH dan MUKIM adalah :

1. **Tuha Peut** adalah suatu Badan yang berpungsi memberi nasehat dan pertimbangan kepada Keuchik/Kepala Desa dan Kepala kelurahan dalam bidang Hukum Adat Istiadat.
2. **Imuem Meunasah** adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan bidang Agama Islam.
3. **Keujreun Blang** adalah orang yang membantu Keuchik/Kepala Desa dan kepala kelurahan dibidang pengaturan dan penggunaan Irigasi dan Per-sawahan.
4. **Panglima Laot** adalah orang yang memimpin Adat Istiadat yang berlaku dibidang penangkapan ikan dilautan termasuk dalam hal ini mengatur tempat/areal penangkapan ikan, penambatan perahu dan menyelesaikan sengketa bagi hasil.
5. **Petua seuneubok** adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembukaan lahan untuk persawahan/perkebunan.
6. **Haria Peukan** adalah orang yang mengatur ketertiban keamanan dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar.
7. **Syahbanda** adalah orang yang memimpin dan mengatur tambatan perahu, lalu lintas keluar dan masuk perahu dibidang angkutan laut dan sungai.

Unsur-unsur ini dalam GEUMA BEUSARE akan merupakan ujung tom-bak dalam pelaksanaan pembangunan.

Ditinjau dari aspek wilayah, dengan ruang sebagai unsur utama, maka GAMPONG atau MEUNASAH dan MUKIM merupakan Ruang Kehidup-an dan Ruang Sosial Ekonomi.

Ruang kehidupan(Life space) adalah ruang yang menggambarkan Pola tingkah laku manusia dalam berbagai aspek kegiatan dan kepentingan dalam suatu ruang yang batas-batasnya dapat ditetapkan, misalnya teritorial.

Ruang ekonomi(Economic Space) adalah ruang yang menggambarkan lokasi dan kaitannya dengan arus-arus komoditi, modal, kapital, tenaga kerja dan informasi, misalnya pasar ruang ekonomi ini bersifat terbuka terhadap perobahan-perobahan dan pengaruh dari luar.

Ruang sosial(Sosial Space) adalah ruang yang menggambarkan hubungan

sosial, sistim nilai-nilai dan norma, ikatan kekerabatan yang kohesif, solidaritas, adat istiadat dan sebagainya.

Ketiga pengertian ini merupakan hal yang tumpang tindih yang menggambarkan suatu CITRA SOSIAL [SOCIAL IMAGE] dari suatu masyarakat. Melalui GEUMA BEUSARE citra sosial masyarakat akan berkembang sejalan dengan pembangunan.

BAB III

ADMINISTRASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN

A. TUJUAN

Pembangunan Desa melalui pendekatan Pembangunan Desa Terpadu GEUMA BEUSARE di Propinsi Daerah Istimewa Aceh bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kehidupan pedesaan dan masyarakat pedesaan sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan selanjutnya dalam kerangka dan tahapan Pembangunan Nasional menuju masyarakat Pancasila.

B. SASARAN POKOK

Pelaksanaan pembangunan desa dengan pendekatan dan strategi pembangunan desa terpadu GEUMA BEUSARE adalah untuk mencapai sasaran pokok pembangunan dan mendukung penerapan kebijaksanaan SEPULUH TEROBOSAN PEMBANGUNAN Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

C. MEKANISME

Dalam pelaksanaan pembangunan desa terpadu GEUMA BEUSARE terdapat beberapa hal yang secara serempak akan berlangsung atau dicapai yaitu :

1. Peningkatan kemampuan dan kapasitas Administrasi Pembangunan, khususnya manajemen Pembangunan.
2. Peningkatan peranserta masyarakat melalui peningkatan fungsi dan peran MEUNASAH dan MUKIM dan fungsionalisasi LAKA(Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) dan Majelis Ulama Indonesia(MUI) pada berbagai tingkatan.
3. Peningkatan kemampuan dan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program dan proyek pembangunan pedesaan.

Pelaksanaan Pembangunan desa terpadu GEUMA BEUSARE diselenggarakan dalam suatu kerangka keterpaduan yang menyeluruh, yaitu keterpaduan diantara peranserta segenap masyarakat dan Pemerintah didalam melaksanakan program- program pembangunan.

Program-program pembangunan sektoral dilaksanakan secara terpadu berdasarkan pendekatan prioritas wilayah dalam kerangka PWPT dan pengembangan kelembagaan.

Mekanisme pelaksanaan Desa terpadu GEUMA BEUSARE yang meliputi kegiatan (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengendalian, dan (4) Koordinasi, dilakukan berdasarkan :

1. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (PSD)
3. Membentuk organisasi pelaksana GEUMA BEUSARE berdasarkan ketetapan dan pedoman yang ada serta disesuaikan dengan dan dalam struktur serta sistim yang lebih berjalan dengan deskripsi tugas yang lebih spesifik.

Proses perencanaan pembangunan,program dan proyek dalam rangka GEUMA BEUSARE didasarkan pada perencanaan dari bawah secara berjenjang dengan mengikut sertakan peranserta masyarakat secara luas melalui bimbingan, dukungan dan keterlibatan semua lembaga dan aparat pemerintah

ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

D. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah pedesaan di dasarkan pada prinsip kebersamaan, kegotong royongan dan keterpaduan antara unsur pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan tolok ukur utama keberhasilan GEUMA BEUSARE.

Pemerintah berkewajiban untuk membangkitkan motivasi memberikan uluran tangan, bimbingan petunjuk, latihan dan penyuluhan dalam rangka menggerakkan peranserta masyarakat.

E. PENGENDALIAN.

Untuk menjamin kelangsungan dan keberhasilan kegiatan-kegiatan GEUMA BEUSARE maka peran dan fungsi aparat pemerintah, baik pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya dan Propinsi memerlukan suatu rentang kendali yang optimal agar sistim manajemen GEUMA BEUSARE dapat berjalan dengan baik.

F. KOORDINASI.

Pelaksanaan GEUMA BEUSARE yng melibatkan semua unsur menghendaki suatu koordinasi yang baik dan merupakan tolok ukur utama dalam keterpaduan pembangunan-pembangunan di Wilayah pedesaan.

BAB IV PENUTUP.

Pedoman tentang pendekatan dan strategi Pembangunan Desa terpadu

GEUMA BEUSARE dalam rangka pembangunan wilayah pedesaan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dimaksudkan sebagai kerangka umum yang memuat pokok-pokok kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan wilayah Pedesaan.

Keberhasilan GEUMA BEUSARE pada hakikatnya tergantung pada semangat kesungguhan dan keterpaduan didalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan secara menyeluruh.

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

2. TUJUAN DAN SASARAN

3. STRATEGI

4. KEBIJAKSANAAN

5. PENYERAPAN DAN PEMBIYARAN

6. PENYERAPAN DAN PEMBIYARAN